

PENGARUH EFEKTIVITAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

ARDI ARIFIANTO

NIM 7211412165



2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

\ Hari

: Kamis

Tanggal: 16 Maret 2017

Mengetahui,

Jurusan Akuntansi

NIP 196206231989011001

Pembimbing

Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., CA. NIP 198501152010122004

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari

: Rabu

Tanggal : 12 April 2017

Penguji I

Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.

NIP 197510101999031001

Penguji II

Linda Agustina, S.E., M.Si. NIP 197708152000122001

Penguji III

Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., CA.

NIP 198501152010122004

tas Ekonomi

95601031983121001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ardi Arifianto

NIM : 7211412165

Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 22 Januari 1995

Alamat : Ds. Lemahabang 005/001, Kec. Doro, Kab. Pekalongan menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini

adalah hasil jimplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 12 April 2017

Ardi Arifianto NIM 7211412165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)" (QS. Al-Insyirah 94: 6-7)

"Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri" (Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN:

- 1. Ibuku Rasiyah dan Ayahku Suwarno yang senantiasa mendidik, memelihara, serta memenuhi segala kebutuhan untuk menjadikan putranya sebagai manusia yang bermanfaat.
- 2. Adikku Lantif Hendi Wijayanto yang selalu mendukung langkah perjuanganku.
- 3. Para Sahabat yang tidak hentinya memberikan semangat serta do'a.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan hikmah kepada para hamba yang dikehendaki-Nya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Efektivitas *Good Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan". Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wa salam*, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, dukungan, semangat, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Fathur Rokhman., M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani studi S1 di Universitas Negeri Semarang.
- 2. Dr. Wahyono M.M. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan prima selama penulis menjalani studi S1 di Fakultas Ekonomi.

- Drs. Fachrurrozie, M.Si. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas selama penulis menjalani studi S1 di Jurusan Akuntansi.
- 4. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si. CA. Dosen Pembimbing yang telah berkenan menelaah, mengarahkan, dan memotivasi selama proses penulisan skripsi ini.
- 5. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. Dosen penguji I yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
- 6. Linda Agustina, S.Pd., M.Si. Dosen penguji II yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
- 7. Trisni Suryarini, S.E., M.Si. Dosen Wali Akuntansi C 2012 yang memberikan bimbingan dan motivasi selama menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
- 8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas bimbingan, bantuan, dan kesabaran dalam memberikan ilmu yang tak terhitung jumlahnya.
- 9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
- 10. Seluruh sahabat seperjuangan Catur, Yasin, Nadim, Yuda, Gilang Maulana, Gilang Wahyu, Shani, Riva'i, Ferdi dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung penulis selama menjalani studi.
- 11. Seluruh keluarga seatap kontrakan Tahu Tempe Cipto, Priyan, dan Ardi yang sudah setia berbagi suka maupun duka selama masa perantauan.

12. Seluruh teman-teman serombel Akuntansi C 2012 yang telah bersama-sama menjalani studi serta menuntut ilmu di jenjang S1 demi menggapai cita-cita, harapan, dan berupaya meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Berbagai upaya penulis lakukan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah karya ilmiah. Namun penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang menjadi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

Semarang, 12 April 2017

Penulis



SARI

Arifianto, Ardi. 2017. "Pengaruh Efektivitas *Good Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing: Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., CA

Kata kunci: Efektivitas Good Corporate Governance; Kinerja Lingkungan; Nilai Perusahaan; Ukuran Perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas good corporate governance dan kinerja lingkungan terdahap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Efektivitas good corporate governance yang digunakan adalah organ perseroan yang terdiri dari hubungan dengan pemegang saham (RUPS), pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi, efektifitas komite audit dan keterbukaan informasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan publik yang terdaftar pemeringkatan PROPER tahun 2015 sejumlah 85 perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan terpilih 76 sampel sebagai unit analisis. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan IBM SPSS 21.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas good corporate governance dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah ada kombinasi antara data primer dan sekunder untuk mencerminkan efektivitas good corporate governance secara menyeluruh dan memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Arifianto, Ardi. 2017. "The Influence of Good Corporate Governance Efectivity and Environmental Performance toward Firm Value". Final Project. Accounting Department, Faculty of Economics, Semarang State University.

Advisor: Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., CA

Keywords: Environmental Performance; Firm Value; Good Corporate Governance Efectivity; Size of Firm.

The study aimed to analize the influence of good corporate governance efectivity and environmental performance to firm value with size of firm as conrol variable. Instrumen of company sudenly relationship with shareholder (General Meeting), character and responsibility board of comisioner, character and responsibility board of director, effectiveness of audit comite and openness of information are the variable good corporate governance used.

The population of this research are all public firm who listed on PROPER year 2015. The sampling method used is purposive sampling method and obtained 76 sampel's as a analysis unit. The data analysis tecnique uses multyvariate regression with IBM SPSS software version 21.

The result of this research showed that good corporate governance Efectivity and firm size had positive effect on firm value, while environmental performance does not affect on firm value.

The sugestion to futher research is to use combination premier data and secunder data for reflect all good corporate governance and added period of ressearch for the better result.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PER <mark>SE</mark> TUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMA <mark>N PENGES</mark> AHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	ix
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1. Teori Agensi (Agency Theory)	15
2.2 Teori Legitimasi	17
2.3. Kajian Variabel Penelitian	19
2.3.1./ Nilai Perusahaan M.E.C.E.P.I.S.E.M.A.P.A.M.C.	19
2.3.2. Good Corporate Governance	29
2.3.3. Kinerja Lingkungan	47
2.3.4 Ukuran Perusahaan	49

2.4 Penelitian Terdahulu	51
2.5 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	64
2.5.1. Pengaruh Efektivitas <i>Good Corporete Governance</i> terhadap Perusahaan	Nilai 64
2.5.2. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	68
3.2. Populasi dan Sampel	68
3.3. Definisi Operasional Variabel	70
3.4. Teknik Pengambilan Data dan Jenis Data	73
3.5. Teknik Analisis Data	74
3.5.1. Analisis <mark>Sta</mark> tistik Deskriptif	74
3.5.2. Uj <mark>i Pr</mark> asyarat Regresi	74
3.5.3. An <mark>alis</mark> is <mark>Re</mark> gresi Berganda	76
3.5.4. Pengujian Hipotesis	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1. Populasi dan Sampel Penelitian	79
4.2. Hasil Penelitian.	81
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	81
4.2.2. Uji Prasyarat RegresiUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	86
4.2.3. Pengujian Hipotesis	92 95
4.3.1. Pengaruh Efektivitas <i>Good Corporete Governance</i> terhadap	
Perusahaan	95

4.3.2.	Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan				
4.3.3.	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan	99			
BAB V PENU	TUP	100			
5.1. Sir	mpula <mark>n</mark>	100			
5.2. <mark>Sa</mark> r	ran	101			
DAFTAR PU	STAKA	102			



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Jumlah Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek dan Nilai		
	Kapit <mark>alis</mark> asi Pasar di Kawa <mark>san</mark> Asia Pasif <mark>ik</mark>	2
Tabel 2.1	Keterangan Kriteria Peringkat PROPER	49
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1	Hasil Pengambilan Sampel	69
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian	73
Tabel 4.1	Klasifikasi Sektor Industri	79
Tabel 4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	81
Tabel 4.3	Distribusi <mark>Frekuensi N</mark> ilai P <mark>erusaha</mark> an	82
Tabel 4.4	Dist <mark>ribu</mark> si Frekuensi Efektivitas GCG	83
Tabel 4.5	Distr <mark>ibu</mark> si Frekuensi Kinerja Lingkungan	85
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan	86
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas Data	87
Tabel 4.8	Hasil Uji Mulltikolinearitas	87
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	89
Tabel 4.1	0 Hasil Regresi Model 1	90
Tabel 4.1	VERSITAS NEGERI SEMARANG 1 Hasil Regresi Model 2	90
Tabel 4.1	2 Koefisien Determinasi Model Regresi 1	92
Tabel 4.1	3 Koefisien Determinasi Model Regresi 2	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Board of Directors dalam One tier System	40
Gambar 2.2	Struktur Two Tiers System yang Berkembang di Indonesia	41
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	67
Gambar 4.1	Klasifikasi Sampel Penelitian Berdasarkan Sektor	80
Gambar 4.2	Klasifikasi Sampel Penelitian Berdasarkan Grup Sektor	80
Gambar 4.3	Penilaian Good Corporate Governance	83
Gambar 4.4	Hasil Penilaian PROPER	85
Gambar 4.3	Diagram Pengaruh Efektivitas GCG dan Kinerja	
	Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan dengan	
	Uku <mark>ran</mark> Pe <mark>rusahaa</mark> n sebagai <mark>V</mark> ar <mark>iab</mark> el <mark>K</mark> ont <mark>rol</mark>	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel	107
Lampiran 2 Nilai Perusahaan	109
Lampiran 3 Indeks Good Corporate Governance dan penskorannya	111
Lampiran 4 Hasil Penilaian Efektivitas Good Corporate Governance	113
Lampiran 5 Kinerja Lingkungan	117
Lampiran 6 Ukuran Perusahaan	118
Lampiran 7 Gabungan Hasil Tabulasi	120
Lampiran 7 Hasil Pengujian SPPS	122



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menjadi terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya tujuan utama investor meletakkan kekayaannya pada suatu instrumen investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan (return) yang maksimal. Oleh karena itu, investor harus memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan sebelum menginvestasikan dananya. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan yang diukur melalui nilai perusahaan (Hariati dan Rihaningtyas, 2015).

Nilai perusahaan menjadi sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset (Tjahjono, 2013).

Salah satu alternatif untuk melihat nilai perusahaan adalah dengan menggunakan nilai kapitalisasi pasar (market capitalizatiom) Mollah et al (2012)

dan Bansal dan Sharma (2016). Kapitalisasi adalah nilai pasar agregat dari saham yang ditentukan oleh harga pasar saham dan jumlah total saham yang beredar. Nilai kapitalisasi pasar bagi perusahaan publik menjadi penting karena mampu menunjukkan nilai total perusaha<mark>an ya</mark>ng sering di<mark>gu</mark>nakan oleh analis untuk mencari indikasi bagaimana investor menilai prospek masa depan suatu perseroan.

Menurut Sudiyatno (2010) meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer sebagai agen yang telah diberi k<mark>epercayaan oleh para p</mark>emilik <mark>perusahaan untuk menjalankan perusaha</mark>annya. Tabel 1.0 menggambarkan jumlah perusahaan yang tercatat di bursa efek dan kapitalisasi pasar di kawasan Asia Pasifik pada akhir tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1.0 Jum<mark>lah Perusahaan yang Tercatat di Burs</mark>a Efek dan Nilai Kapitalisasi Pasar di Kawasan Asia Pasifik

Exchange	End 2015		End 2014		% change
EXCHANGE	Listed Company	(USD millions)	Listed Company	(USD millions)	2015/2014
Australian Securities Exchange	2.108	1.187.083,45	2.073	1.288.708,34	-7,89%
BSE India Limited	5.836	1.516.216,71	5.542	1.558.299,69	-2,70%
Bursa Malaysia	902	382.976,65	905	459.004,37	-16,56%
Colombo Stock Exchange	294	20.804,11	294	23.665,12	-12,09%
Hochiminh Stock Exchange	307	51.876,65	305	46.067,02	12,61%
Hong Kong Exchanges and Clearing	1.866	3.184.874,22	1.752	3.233.030,59	-1,49%
Indonesia Stock Exchange	521	353.270,96	506	422.127,05	-16,31%
Japan Exchange Group	3.513	4.894.919,12	3.470	4.377.994,37	11,81%
Korea Exchange	1.961	1.231.199,76	1.864	1.212.759,46	1,52%
National Stock Exchange of India Limited	1.794	1.485.088,62	1.708	1.520.925,10	-2,36%
NZX Limited	191	74.350,50	174	74.415,69	-0,09%
Philippine Stock Exchange	265	238.819,94	263	261.840,67	-8,79%
Shanghai Stock Exchange	1.081	4.549.288,03	995	3.932.527,68	15,68%
Shenzhen Stock Exchange	1.746	3.638.731,29	1.618	2.072.419,99	75,58%
Singapore Exchange	769	639.955,90	775	752.831,01	-14,99%
Stock Exchange of Thailand	639	348.798,01	613	430.426,61	-18,96%
Taipei Exchange	712	83.027,05	685	84.822,47	-2,12%
Taiwan Stock Exchange	896	744.999,66	880	850.943,07	-12,45%
Sumber: World Federation of Exchange					

Sumber: World Federation of Exchange

Berdasarkan data dari *World Federation of Exchange* yang disajikan dalam Tabel 1.0 di atas dapat diketahui bahwa nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya. Sebagai negara anggota G20 (kelompok 19 negara dengan perekonomian besar ditambah Uni Eropa), nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia pada penutupan akhir tahun 2014 hanya sebesar 422.127,05 juta Dolar Amerika dan menurun 16,31% pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 353270,96 juta Dolar Amerika yang masih dibawah Malaysia dan Singapura yang notabene bukan merupakan anggota dari G20. Rendahnya nilai perusahaan di Indonesia mencerminkan manajer kurang optimal dalam mengelola perusahaan.

Secara praktis, proses memaksimalkan nilai perusahaan sering kali menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara pengelola (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Setelah krisis moneter yang menghatam perekonomian di negara-negara Asia menjelang akhir tahun 1900-an, muncul inisiatif untuk menguatkan kerangka tata kelola perusahaan, baik ditingkat nasional maupun regional. Studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) mengidentifikasi bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut adalah "lemahnya tata kelola perusahaan" (Zhuang, *et al* 2000).

Teori agensi memberikan pandangan bahwa praktik kecurangan yang dilakukan oleh agen hingga berdampak pada turunnya nilai perusahaan dapat diminimalisir dengan adanya suatu mekanisme pengawasan atau monitoring, yaitu melalui implementasi tata kelola perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan diharapkan mampu menjadi penghambat perilaku kecurangan agen, sehingga laporan kinerja perusahaan menggambarkan nilai fundamental yang sebenarnya. Selain itu, juga diharapkan dapat menciptakan kinerja organisasi yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Mekanisme corporate governance dapat diimplementasikan untuk mengurangi masalah keagenan. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa manajer selaku agen akan bertindak untuk kepentingan terbaik kepada pemegang saham. Selain itu dapat memaksakan manajer untuk mengungkapkan informasi penting sehingga asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalkan, sehingga perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki lebih banyak

pengungkapan akan memiliki masalah keagenan yang sedikit sehingga nilai perusahaan akan lebih baik juga (Siagian, Siregar, dan Rahadian, 2013).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan produk hukum utama bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), termasuk perusahaan yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik di pasar modal. Pada dasarnya, UUPT ini telah mengakomodasi konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dibandingkan undang-undang sebelumnya. Kini, dewan komisaris dan direksi dituntut untuk lebih akuntabel dalam melaksanakan *fiduciary duties*. Kewajiban untuk mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) juga mulai diterapkan dalam UUPT 2007.

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. GCG merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik-praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dalam publikasinya "ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and Assessments 2012-2013" pada tahun 2014 mengeluarkan hasil studinya terhadap penerapan corporate governance di enam Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Studi dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang listed dipasar modal. Hasil studi yang dilakukan menempatkan Indonesia pada urutan kelima. Indonesia berada di bawah Thailand yang berada di urutan pertama, Singapura diurutan kedua, kemudian disusul dengan Malaysia dan Filipina diurutan ketiga dan keempat. Sedangkan urutan terakhir ditempati oleh Vietnam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan good corporate governance di Indonesia belum optimal. Padahal, penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi konflik keagenan yang timbul di perusahaan Jensen dan Meckling (1976).

Pentingnya corporate governance juga telah menjadi perhatian para peneliti di berbagai negara untuk menyelidiki pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, namun beberapa penelitian tentang pengaruh good corporate governance menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan indikator tiap variabel untuk mengukur GCG yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Siagian, Siregar, dan Rahadian (2013) yang menggunakan sampel sebanyak 125 perusahaan yang terdaftar di bursa Jakarta Stock Exchange (JSX) tahun 2003 dan 2004 mengungkapkan bahwa corporate governance yang diukur menggunakan teknik skoring berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal serupa juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mishra dan Mohanty

(2014) yang menguji pengaruh antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA, dan Prastina (2012) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan sampel 31 perusahaan yang terdaftar dalam ajang *Corporate Governance Perseption Index* (CGPI) *Awwards* pada tahun 2006, 2007, 2008 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil peelitian menemukan *corporate governance* yang diukur menggunakan skor CGPI berpengaruh popsitif terhadap ROE.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastina (2012) yang menemukan *corporate governance* yang diukur menggunakan skor CGPI tidak berpengaruh terhada ROA dan Tobin's Q, kemudian Respati dan Yuniar (2014) juga tidak menemukan pengaruh antara pelaksanaan corporate governance perbankan terhadap kinerja perbankan, demikian dengan Yanti (2015) tidak menemukan adan<mark>ya peng</mark>aruh antara meknisme *corporate governance* (Proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit) terhadap nilai perusahaan, dan Haji (2014) juga tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara atribut corporate governance (anggota keluarga dalam dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) terhadap kinerja perusahaan.

Di sisi lain, tingginya peringkat kinerja lingkungan perusahaan juga merupakan salah satu faktor fundamental lainnya yang mampu meningkatkan nilai perusahaan (Hariati dan Rihaningtyas, 2015). Undang-undang No. 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membahas mengenai pencegahan serta pengendalian dan kepastian hukum pencemaran lingkungan. Sejak tahun 2002, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup juga telah membuat program penilaian sebagai upaya penanggung jawab dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) digunakan untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan dan memacu perusahaan agar semakin baik dalam usaha peduli lingkungan. Namun ternyata masih saja terdapat kerusakan–kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.

Penggunaan warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, mulai dari terbaik, EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai ke yang terburuk, HITAM untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada. Bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang lebih rinci, Kementrian Lingkungan Hidup dapat menyampaikan secara khusus. Aspek penilaian PROPER adalah ketaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, AMDAL serta pengendalian pencemaran laut. Ketentuan ini bersifat wajib untuk dipenuhi. Jika perusahaan memenuhi seluruh peraturan tersebut (*in compliance*) maka akan diperoleh peringkat BIRU, jika tidak maka MERAH atau HITAM, tergantung kepada aspek ketidak-taatannya.

Hasil dari diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini pelaksanaannya masih jauh dari harapan, terbukti dari masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang tergabung dalam PROPER mendapatkan peringkat hitam sejak dimulainya program tersebut dengan jumlah tertinggi pada tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 79 perusahaan yang berarti bahwa perusahaan tersebut secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan serta berpotensi mencemari lingkungan. Tren ketaatan PROPER pun belum menunjukkan hasil-hasil yang memuaskan. Dari awal program ini dilakukan pada tahun 2002, tren ketaatan perusahaan mencapai 60% dan menurun pada tahun 2003 dan 2005 menjadi 56%, yang kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2006 menjadi sebesar 81%, akan tetapi tren ketaatan terus menurun sampai pada tahun 2013 menjadi 61% (Publikasi PROPER 2015).

Hal ini menggambarkan masih banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan andil dalam masalah pencemaran lingkungan di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan pengaturan secara khusus mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup ini. Dan tentunya sudah selayaknya perusahaan bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya.

Semakin baik bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup maka citra atau *image* perusahaan akan meningkat. Hal ini terjadi karena perusahaan telah mampu memenuhi kontrak sosial atau legitimasi terhadap masyarakat, sehingga keberadaannya direspon positif oleh masyarakat.

Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra atau *image* baik di masyarakat karena berdampak pada tingginya loyalitas konsumen yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Hariati dan Rihaningtyas, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan, baik didalam maupun diluar negeri. Namun konsistensi terhadap hasil penelitian masih sangat beragam. Titisari dan Alviana (2012) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan (PROPER) terhadap kinerja ekonomi (ROA) tahun berjalan dan tahun sesudahnya dengan sampel sebanyak 28 perusahaan publik yang berpartisipasi dalam program PROPER tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi tahun berjalan secara signifikan, begitupun juga dengan Tjahjono (2013) pada 31 perusahaan yang terdaftar di *Indonesia Stox Index* taun 2010-2011 menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan MVA, dan Saridewi dan Koesrindartoto (2014) dan Fitriani (2013) bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ROA.

Namun berbeda dengan penelitian Titisari dan Alviana (2012) pada 28 perusahaan publik yang berpartisipasi dalam program proper tahun 2007-2009 menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja eknomi tahun sesudahnya demikian dengan Rakhiemah dan Agustia (2009) yang menemukan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan, kemudian Tjahjono (2013)

pada 31 perusahaan yang terdaftar di *Indonesian Stox Index* tahun 2010-2011 tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan (Tobin's Q).

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pengukuran efektivitas *good corporate governance*. Dalam penelitian ini efektivitas *good corporate governance* diukur dengan menggunakan indeks yang disesuaikan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2014 mengenai penerapan tata kelola perusahaan serta didukung dengan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan skoring.

Menindaklanjuti saran dari penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009) untuk menambahkan variabel kontrol dalam penelitian selanjutnya, maka dalam penelitian ini menghadirkan ukuran perusahaan (size) sebagai variabel kontrol untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Penggunaan total aset juga digunakan oleh Titisari dan Alviana (2012), dan Haji (2014) sebagai variabel kontrol untuk meneliti hubungan antara good corporate governance terhadap nilai perusahaan maupun kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan karena banyak penelitian yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dan nillai perusahaan.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) karena PROPER merupakan pengukuran untuk kinerja lingkungan yang ada di Indonesia. Tjahjono (2013) berpendapat Rating PROPER yang disediakan oleh pemerintah cukup terpercaya sebagai ukuran kinerja lingkungan perusahaan. Selain itu, PROPER menjadi salah satu studi kasus di *Harvard Institute for International Development* (HIID). Sejak dikembangkan di Indonesia, PROPER telah menjadi contoh di berbagai negara di Asia, Amerika, dan Afrika sebagai instrumen penataan alternatif. Dan pada tahun 1996, PROPER mendapatkan penghargaan *Zero Emission Award* dari *United Nations University* di Tokyo (www.proper.menlh.go.id). Tahun 2015 digunakan dalam penelitian karena pada akhir tahun 2014 OJK selaku otoritas yang megatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal di Indonesia menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan beberapa peraturan baru yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1.2 Perumusa<mark>n M</mark>asalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah efektifitas *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?,
- 2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh efektivitas *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, dan
- 2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengauh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan

1.4 Man<mark>fa</mark>at Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi. Khususnya, mengenai peran efektivitas *good corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan sehingga dapat tercapainya nilai perusahaan yanng tinggi. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan mengevaluasi, memperbaiki, dan mengoptimalkan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat secara umum mengenai pengaruh efektivitas *good corporate governance* dan kinerja lingkungan perusahaan terhadap nilai perusahaan

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengembangan dan pembuatan kebijakan mengenai *good corporate governance* dan kinerja lingkungan dimasa mendatang sehingga diharapkan akan meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) merupakan suatu basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menjelaskan hubungan antara principals dengan agents. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (prinsipals) melibatkan pihak lain (agents) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipals. Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsipals adalah pihak yang memberi perintah atau pemegang saham (investor), sedangkan yang dimaksud dengan agents adalah manajemen perusahaan yang bertugas mengelola sumber daya perusahaaan yang dipercayakan principals kepada mereka.

Lebih lanjut, teori agensi juga menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak agents dan prinsipals. Namun, dalam kenyataanya hubungan kontraktual antara agents dan prinsipals tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Manajer (agents) sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk mengelola atas operasional perusahaan memiliki informasi lebih banyak dan lebih up to date mengenai kondisi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham (principals), kondisi tersebut dikenal sebagai asimetri informasi (information

asymmetry). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Karena perbedaan kepentingan tersebut, masingmasing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Manajer yang mengetahui informasi perusahaan lebih banyak dibanding pemegang saham akan memungkinkannya untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri serta merugikan pihak lain (Jensen dan Meckling, 1976),

Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1). Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest),
- 2). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded relationalitty),
- 3). Manusia selalu mengindari risiko (risk averse).

Salah satu cara yang digunakan dalam mengatasi masalah kontrak dan mengurangi sifat oportunistik manajer adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (corporate governance). Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dengan adanya tata kelola yang baik yang diterapkan oleh perusahaan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance juga berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa para manajer akan memberikan keuntungan kepada investor melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham yang tercermin dari harga sahamnya. Selain itu, mekanisme corporate governance juga dapat memberikan keyakinan bahwa manajer tidak akan mencuri atau

menggelapkan dana yang ditanamkan oleh investor sehingga akan menjamin kelangsungan investasi para pemegang saham.

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa, organisasi secara terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya diterima sesuai dengan batasan dan norma oleh masyarakat, sehingga mereka mencoba untuk meyakinkan bahwa aktivitasnya diterima oleh pihak luar (Deegan dan Unerman, 2006). Hal ini berarti bahwa, keberadaan organisasi akan dapat berlanjut apabila sistem nilai yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Kegagalan organisasi dalam memenuhi kontrak sosial, akan menjadikan sebuah ancaman bagi keberlanjutan usaha (going concern) organisasi tersebut. Ancaman tersebut dapat berupa pemboikotan produk, pembatasan sumber daya (tenaga kerja, bahan baku, modal keuangan), bahkan hingga pencabutan ijin usaha. Jika organisasi mampu memenuhi kontrak sosial tersebut, maka keberadaan organisasi akan direspon positif oleh masyarakat. Adanya citra atau *image* positif dari masyarakat diharapkan mampu meningkatkan laba organisi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Hariati dan Rihaningtyas, 2015).

Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi menggunakan sumber ekonomi. Dikutip dalam Ghozali dan Chariri (2007) Shocker dan Sethi (1974) memberikan penjelasan mengenai kontrak sosial sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup perusahaan didasarkan pada :

- 1. Hasil akhir (*output*) secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas, dan
- 2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Kontrak sosial muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan. Keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan, maka perlu kontrak sosial yang baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan yang saling melindungi kepentingan (Hadi, 2011).

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, dengan begitu kelangsungan hidup sebuah perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap operasi organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi tersebut (Deegan dan Unerman, 2006). Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi "Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi

organisasi, batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosisal dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan" Dowling dan Preffer dalam dalam (Ghozali dan Chariri 2007).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi juga menyatakan bahwa organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Unerman, 2006)

Perusahaan akan memastikan bahwa mereka akan beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan diterima oleh pihak luar sebagai sesuatu yang sah (Deegan dan Unerman, 2006). Di saat ada perbedaan antara nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat maka legitimasi perusahaan berada dalam posisi terancam. Perbedaan antara nilai perusahaan dan nilai masyarakat tersebut dinamakan "*legitimacy gap*" dowling dan Preffer dikutip oleh (Ghozali dan Chariri, 2007).

2.3 Kajian Variabel Penelitian

2.3.1 Nilai Perusahaan AS NEGERI SEMARANG

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menjadi terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gitosudarmo (2002) memaksimalkan nilai perusahaan tidak

sama dengan memaksimalkan keuntungan atau laba. Memaksimalkan nilai perusahaan meliputi aspek-aspek yang lebih luas dari memaksimalkan keuntungan atau laba. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Mempertahankan tingginya harga saham

Harga saham di pasar merupakan salah satu perhatian utama manajer keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Manajer harus selalu berusaha untuk menarik minat investor maupun calon investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dengan adanya citra baik perusahaan sebagai tempat penanaman modal yang aman dan menguntungkan di mata para investor maka hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Mengusahak<mark>an p</mark>ertumb<mark>uh</mark>an

Pertumbuhan perusahaan erat kaitannya dengan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk melihat pertumbuhan perusahaan adalah dengan melihat pertumbuhan penjualannya, apabila perusahaan dapat mengembangkan penjualan berarti perusahaan dapat bersaing di pasar sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

3. Menghindari risiko yang tinggi

Perusahaan yang ingin menjalankan operasi bisnisnya dalam jangka panjang UNIVERSITAS NEGERISEMARANG maka akan menghindari risiko yang tinggi. Perusahaan akan menghindari proyek-proyek yang memiliki risiko yang tinggi meskipun mungkin tingkat labanya juga

tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kegagalan yang dapat mematikan kelangsungan operasi perusahaan.

4. Membayar deviden

Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham oleh perusahaan. Besarnya deviden harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan para pemegang saham, oleh sebab itu perusahaan harus mampu memanajemen dana dengan sebaik mungkin.

Ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan untuk menilai perusahaan, di antaranya adalah:

- 1. Pendekatan laba, antara lain metode rasio tingkat laba atau *Price Earning Ratio*.
- 2. Pendekatan arus kas, antara lain metode diskonto arus kas.
- 3. Pendekatan dividen, antara lain metode pertumbuhan dividen.
- 4. Pendekatan aktiva, antara lain metode penilaian aktiva.
- 5. Pendekatan harga saham.
- 6. Pendekatan Economic Value Added (EVA).

Menurut Fama (1978), nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga

akan meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat. Nilai perusahaan dapat diukur dari berbagai aspek diantaranya adalah melalui nilai buku (book value) dan nilai pasar (market value) ekuitas. Nilai buku ekuitas adalah nilai ekuitas yang didasarkan pada pembukuan perusahaan. Sedangkan nilai pasar ekuitas adalah nilai ekuitas berdasarkan harga pasar yang sering dikaitkan dengan harga saham perusahaan di pasar (Hariati dan Rihaningtyas, 2015).

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

1. Faktor-faktor <mark>yan</mark>g Mempengaruhi Nilai Per<mark>us</mark>ah<mark>aan</mark>

Amirya dan Atmini (2010) dalam penelitiannya salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahan adalah tingkat hutang. Dalam penelitian ini tingkat hutang menunjukkan arah yang negatif, artinya pada tingkat tingkat hutang rendah, nilai perusahaan tinggi. Sebaliknya pada tingkat tingkat hutang tinggi, nilai perusahaan rendah. Sesuai dengan pecking order theory, maka perusahaan dengan profitabilitas rendah akan mempunyai dana internal yang relatif sedikit sehingga memerlukan lebih banyak pendanaan eksternal, yang terutama berasal dari hutang. Karena semakin rendah profitabilitas terkait dengan nilai perusahaan

yang semakin rendah dan tingkat hutang yang semakin tinggi, akibatnya terdapat hubungan negatif antara tingkat hutang dan nilai perusahaan.

Barbara (2011) menemukan dua faktor yang Gunawan, mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang pertama adalah keputusan investasi. Dalam penelitian ini keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dikaji dari teori signaling, pengeluaran modal perusahaan penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Karena jenis investasi akan memberi sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan dimasa yang akan datang dan mampu meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikaor nilai perusahaan. Efek langsung keputusan investasi terhadap nilai pe<mark>rusahaan merupa</mark>kan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan deviden. Dalam penelitan ini kebijakan deviden berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang mempunyai DPR yang tinggi belum tentu akan memberikan devid<mark>en y</mark>ang besar, karena ke<mark>mung</mark>kinan perusahaan akan menggunakan hasil labanya yang akan digunakan sebagai tambahan modal untuk memutar kegiatan perusahaan.

Hariati dan Rihaningtyas (2015) menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Diantaranya adalah kepemilikan institusional yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, Sebagian besar kepemilikan saham pada perusahaan sampel adalah struktur kepemilikan terkosentrasi, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan famili antara investor institusi dengan manajemen. Proporsi dewan komisaris independen yang berpengaruh

positif terhadap nilai perusahaan, Hal ini ini dikarenakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dewan komisaris independen mampu menjaga sikap keindependensiannya yang tidak terbatas pada pemegang saham mayoritas tetapi juga mewakili seluruh pemegang saham baik minoritas maupun asing. Ukuran komite audit yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, efektifitas komite audit dapat terbentuk apabila komite audit tersebut independen, transparan, memiliki akuntabilitas yang tinggi, adil, dan memiliki *charter* komite audit. Dan Kinerja lingkungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila perusahaan mampu memperhatikan pengelolaan lingkungannya, maka keberadaan perusahaan tersebut akan direspon positif oleh masyarakat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra atau *image* baik di masyarakat karena berdampak pada tingginya loyalitas konsumen yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

Hermuningsih, Sri (2013) menemukan profitabilitas sebagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehinggga memicu permintaan saham oleh investor. Respon positif dari investor tersebut akan meningkatkan harga saham dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Faktor berikutnya adalah *growth opportunity* yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Efek langsung keputusan investasi terhadap nilai perusahaan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi itu sendiri melalui pemilihan proyek atau kebijakan lainnya seperti

penciptaan produk baru, penggantian mesin yang lebih efisien, pengembangan research & development dan merger dengan perusahaan lain. Faktor struktur modal memiliki pengaruh yang positif dan siginifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penambahan hutang merupakan sinyal positif bagi investor dan mempengaruhi nilai perusahaan. Bagi perusahaan, adanya hutang dapat membantu untuk mengendalikan penggunaan dana kas secara bebas dan berlebihan oleh pihak manajemen. Peningkatan kontrol ini pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari peningkatan harga saham.

M dan Priantinah (2012) menemukan tiga faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang pertama adalah GCG yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih kepada perusahaan yang memberikan transparansi atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Kemudian faktor *Leverage* yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan faktor pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, Hal ini dikarenakan kualitas pengungkapan CSR dari tahun 2007-2010 masih rendah dan belum mengikuti standar GRI.

Rahmayanti dan Solikhah (2016) menemukan faktor ukuran komite audit yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan maka akan menciptakan proses pengawasan terhadap keandalan laporan keuangan, sistem pengendalian internal,

dan pelaksanaan GCG dengan lebih baik. Selain itu, komite audit juga berperan adalah sebagai alat pengendali dalam mekanisme *corporate governance* yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian faktor frekuensi rapat komite audit yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara efektif. Semakin tinggi tingkat frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit maka koordinasi antar anggotanya akan berjalan dengan baik, sehingga apabila ditemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan usaha untuk memastikan kualitas laporan keuangan perusahaan akan dengan cepat ditentukan solusinya. Dan faktor pengungkapan modal intelektual yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan modal intelektual merupakan sinyal positif mengenai keunggulan perusahaan, semakin banyak pengungkapan yang dilakukan maka semakin tinggi juga penilaian investor terhadap perusahaan.

Siagian, Siregar, dan Rahadian (2013) menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang pertama adalah *corporate governance* yang diukur menggunakan teknik skoring berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV, TQ dan ROA). Kemudian faktor ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV, TQ dan ROA). *Growth* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV, TQ dan ROA). kualitas pelaporan yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (PBV, TQ dan ROA). Perusahaan-perusahaan dengan nilai perusahaan rendah cenderung mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang kualitas pelaporan. Hal ini

dimungkinkan bahwa perusahaan dengan nilai tinggi menganggap kualitas pelaporan tidak penting. Disisi lain, perusahaan dengan nilai rendah menganggap kualitas pelaporan sebagai kesempatan untuk mendapatkan nilai pasar. Mereka memiliki intensif lebih yang tinggi untuk mematuhi dalam rangka meningkatkan nilai mereka. dan *leverage* perusahan yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV dan ROA).

Sudiyatno (2010) dalam penelitiannya menemukan kinerja perusahaan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Kinerja perusahaan ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja perusahaan berpengaruh positif, berarti kinerja perusahaan olehpara pelaku bursa digunakan sebagai signal informasi positif untuk investasinya. Oleh karena itu, ketika perusahaan meraih return (ROA), maka akan ditangkap oleh para pelaku bursa sebagai signal positif adanya dividend yield di masa yang akan datang. Selain kinerja perusahaan, leverage ditemukan juga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan arah yang positif, terhadap nilai perusahaan, leverage keuangan berpengaruh positif, berarti penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi pengaruh ini tidak linier, melainkan sampai pada batas maksimal penggunaan hutang. Penggunaan hutang setelah melewati batas maksimal, akan dapat menurunkan nilai perusahaan.

Sukirni, Dwi (2012) menemukan tiga faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang pertama adalah kepemilikan manajerial yang berpengaruh negatif secara signifkan terhadap nilai perusahaan. Hal ini

dikarenakan belum banyak pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang cukup signifikan. Jumlah kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kep<mark>en</mark>tingan perus<mark>ahaan.</mark> Jumlah kep<mark>em</mark>ilikan saham yang belum signifikan te<mark>rsebut me</mark>nyebabkan manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai pemegang saham. Faktor yang kedua kep<mark>emilikan Institusional yang ber</mark>pengaruh positif secara signifkan terhadap nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pe<mark>manfaatan aktiva perusah</mark>aan dan di<mark>ha</mark>rap<mark>kan juga dapat bertindak</mark> sebagai pencegahan terhadap pemborosan dan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang ketiga kebija<mark>kan hutang yang berp</mark>en<mark>garuh po</mark>sit<mark>if seca</mark>ra signifkan terhadap nilai perusahaan. Hasi<mark>l pe</mark>nel<mark>iti</mark>an ini didukung dengan *trade off theory* dimana tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhada<mark>p bi</mark>aya kesulitan keuangan. Te<mark>ori</mark> ini memperbandingkan manfaat dan biaya atau keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan hutang.

Ulum (2015) menemukan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah kinerja modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual. Investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah sedangkan pengungkapan modal intelektual akan mengurangi asimetri

informasi sehingga akan membantu investor dalam penilaian kinerja perusahaan dan dapat melakukan analisis yang tepat mengenai prospek perusahaan di masa depan.

Dari fakor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan diatas, penggunaan variabel good corporate governance dalam penelitian ini dikarenakan dalam teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan yang mengakibatkan adanya agency conflict dapat diatasi dengan menggunakan tata kelola (corporate governance) yang baik, karena dengan adanya penerapan good corporate governance akan memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima keuntungan yang maksiman atas dana yang mereka investasikan. Sedangkan penggunaan kinerja lingkungan digunakan dalam penelitian ini bahwasanya teori legitimasi menjelaskan adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat agar terjadi keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Agar dapat diterima masyarakat, perusahaan harus memperhatikan masalah lingkungan yang ditimbulkan atas aktivias operasinya, maka dari itu apabila perusahaan ingin meningkatkan nilainya, perusahaan harus meningkatkan juga kinerja lingkungannya.

2.3.2 Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Walaupun istilah *good corporate governance* dewasa ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah "corporate governance" pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committe, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh banyak pihak.

Cadbury Committe of United Kingdom dalam Agoes dan Ardana (2013) mendefinisakan corporate governance sebagai berikut: "A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, kreditors, the govverment, employes, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, of the system by which companies are directed and controlled".

Forum for Corporate Governance in Indonesia – FCGI (2006) dalam Agoes dan Ardana (2013) tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committe of United Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah

"... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan".

Organization of Economic Cooperation and development (OECD) dalam Agoes dan Ardana (2013) mendefinisikan GCG sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.

Sedangkan Surya dan Yustiavandana (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, Respati dan Yusniar (2014) menyimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan: 1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya, 2) Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, dan 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006), ada lima prinsip dasar *good corporate governance*, yaitu:

a. Transparansi (*Transparency*), untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

- undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), perusahaan harus mampu untuk bertanggungjawab atas kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- c. Responsibilitas (*Responsibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambunngan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d. Independensi (*Independency*), untuk melancarkan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Surya dan Yustiavandana (2006) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing,
- b. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah,
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan,
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan,
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan dewan direksi dalam arti sempit. Namun harus disadari bahwa betapa pun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi pemicu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para pelaku bisnis itu sendiri (Agoes dan Ardana 2013).

3. Good Corporate Governance dan Hukum Perseroan di Indonesia

Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40

Tahun 2007 yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratkan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Pertimbangan yang melatarbelakangi dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, Undang-Undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan peran, wewenang, tugas dan tanggungjawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ

perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Anggota dewan komisaris dan dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan dewan direksi serta memberikan nasehat dan arahan kepada dewan direksi dalam menjalankan operasi perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah titetapkan oleh RUPS, dewan komisaris, serta anggaran dasar masing-masing organ ini selanjutnya dalam anggaran dasar perseroan.

Ketentuan terkait RUPS bagi perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Sedangkan ketentuan terkait RUPS bagi perusahaan tertutup diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

b. Direksi

Menurut UU Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Hal-hal terkait keanggotaan direksi telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara perusahaan terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi direksi yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi direksi yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan perusahaan terbuka secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi direksi tersebut dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Efektivitas dari direksi dapat dilihat dengan bagaimana direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Seperti halnya jumlah direksi, aktivitas direksi, kompetensi direksi maupun hal lain yang berpengaruh terhadap kinerja direksi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 20 mengatur tentang keanggotaan direksi. Dimana dalam ayat (1) disebutkan direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi. Sedangkan dalam Pasal 16 mengatur tentang rapat direksi dimana dalam ayat (1) direksi wajib mengadakan rapat direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Hal ini berarti dalam satu tahun direksi minimal harus mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) kehadiran direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Guna mencapai tujuan yang ditetapkan perseroan, direksi hendaknya memiliki kemampuan atau keahlian yang memadai. Dalam Keputusan Bapepam-LK No. Kep-431 Tahun 2012, Laporan tahunan emiten setidaknya mengungkapkan keahlian/pengalaman kerja/latar belakang pendidikan serta remunerasi anggota dewan direksi dalam laporan tahunan emiten.

c. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasehat kepada direksi.

Hal-hal terkait keanggotaan dewan komisaris telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sementara prosedur nominasi

anggota dewan komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian, dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara perusahaan terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi dewan komisaris yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi dewan komisaris yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas perusahaan terbuka dan pemberian nasihat kepada direksi secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi dewan komisaris tersebut dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para stakeholder.

Efektivitas dari dewan komisaris dapat dilihat dengan menguji faktorfaktor yang dapat mempengaruhi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan
komisaris. Faktor-faktor tersebut seperti jumlah anggota dan kompetensi dari
dewan komisaris, indenpendensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris.

Jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak memiliki ketetapan yang baku mengenai jumlah yang harus ada. Industri serta operasi yang dijalankan oleh setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga kebutuhan akan jumlah dewan komisaris yang berbeda-beda pula. karena setiap industri dan operasi bisnis tertentu memiliki tingkat resiko yang berbeda dan tingkat penanganan yang berbeda-beda. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris akan sangat

membantu dalam fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga bisa terkelola dengan baik.

Adanya komisaris independen diperlukan untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas serta memantau dan mengontrol dewan direksi (Jensen dan Meckling, 1976). Fama dan Jensen (1983) juga menyatakan keberadaan komisaris independen akan membuat struktur dan kontrol tata kelola perusahaan lebih baik sehingga idealnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam UU PT No 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) dan POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20 Ayat (1) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka (PT) wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Kemudian pada POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20 Ayat (3) dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20, dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya. Selain itu rapat dewan komisaris menjadi indikasi bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab dewan komisaris berjalan dengan baik. Dewan komisaris yang sering mengadakan pertemuan dapat dengan cepat memulihkan kondisi perusahaan saat terpuruk, dengan demikian

diadakannya rapat tambahan diperlukan untuk mencari solusi atas memburuknya kinerja perusahaan (Haji, 2014). Dalam POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20 ayat (1) mengatur dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Sedangkan jumlah kehadirannya diatur dalam ayat (4) yang mewajibkan kehadiran anggota dewan komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

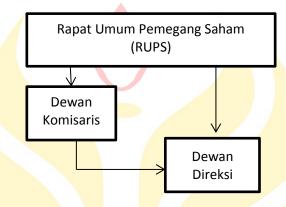
Sehubungan dengan sistem hukum yang berkaitan dengan organ direksi dan komisaris ini, dapat dijumpai adanya dua sisem pengelolaan puncak (top management) suatu perseroan, yaitu model Anglo-Saxon dan model kontinental Surya dan Yustiavandana (2006). Model Anglo-Saxon (single-board system) diikuti oleh Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya pemisahan antara direksi (selaku pelaksana) dengan dewan komisaris (selaku pengawas). Kedua fungsi ini disatukan dan disebut sebagai board of directors.



Gambar 2.1 Struktur Board of Directors dalam One Tier System Sumber: FCGI

Sedangkan sistem kontinental dianut oleh negara-negara Eropa selain Inggris yang juga dianut oleh Indonesia, menggunakan model *two-board system*, dimana organ dewan direksi sebagai eksekutif perseroan dipisah dengan organ

dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi (Agoes dan Ardana, 2013).



Gambar 2.2 Struktur Two Tiers System yang Berkembang di Indonesia

Sumber: FCGI

Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam prakteknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Hal ini karena sifat undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan secara garis besar saja sehingga pasti ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut dalam bentuk peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta institusi atau organisasi profesi terkait (Agoes dan Ardana, 2013).

Surya dan Yustiavandana (2006) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 21 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite terrentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Persyaratan untuk menjadi anggota komite audit adalah :

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;

- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
- h. Tidak memp<mark>uny</mark>ai <mark>sah</mark>am langsung maupun t<mark>idak lang</mark>sung pada emiten atau perusahaan publik;
- i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris,anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

- g. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- h. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
- i. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- j. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam implementasi good corporate governance. Namun keberadaan komite audit tidak langsung menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan komite audit atas perusahaan berlangsung secara efektif. Efektivitas komite audit dapat dilihat berdasarkan karaketristik yang dimiliki oleh komite audit, yaitu jumlah komie audit, kompetensi komite audit, maupun aktivitas komite audit.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit Peraturan Nomor IX.I.5 Nomor 2 poin (a) menyatakan komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga)

orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Kemudian dalam Nomor 3 poin (e) anggota komite audit diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yaitu memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan (minimal 1 orang). Tentunya dengan kompetensi yang memadai dari anggota komite audit, diharapakan keberadaan komite audit akan menjadi efektif dalam rangka penerapan *good corporate governance* yang efektif.

Selain jumlah anggota dan kompetensi komite audit diatas, usia (umur) komite audit juga dapat dijadikan dalam penilaian efektivitas good corporate governance, hal ini terkait dengan lamanya pengalaman yang telah diperoleh komite audit. "If the average age of the audit committee more than 40 years old, the company will receive a "good' score. If the average age of the audit committee between 30 and 40 years old, the score is "fair", and if the average age is below 30 years old, the soce will be "poor'" Hermawan (2009) dalam Deborah (2012). Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa usia terbaik komite audit diatas 40 tahun.

Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian perusahaan, dan pelaksanaan *good corporate governance*. Poin (a) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Nomor 7 menyatakan komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tingkat kehadiran rapat anggota komite audit, akan tetapi *Indonesian Institute for Corporate Directorship*

(IICD) 2005 menjelaskan tingkat kehadiran rapat tiap anggota komite audit seperti dalam kutipannya "If the overall audit committee attendence or the year is greather than 80%, the firm earns a 'good' score. If attdendance is 70%-80% receive a 'fair' score, and less than 70% or no information receives a 'poor' score".

Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan komite audit maka dibentuk Piagam Komite Audit (*Audit Charter*). Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai wujud komitmen dari perseroan dalam menerapkan *good corporatte governance* secara optimal. Poin (e) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Nomor 1 mewajibkan emiten atau perusahaan publik memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Charter*).

2.3.3 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah bagaimana kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Di Indonesia, kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diadakan oleh kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Program ini merupakan salah program keunggulan Kementrian Lingkungan Hidup dalam pemberian insentif dan atau disintensif kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan. Tujuan diadakannya program ini agar perusahaan terdorong untuk menaati peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan

(enviromental exellency) melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi.

PROPER dimulai sejak tahun 1996, namun terhenti pada tahun 1997 sampai tahun 2001 karena krisis ekonomi. Paa tahun 2002 PROPER dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih lengkap. Tahun 2010-2014 penekanan diberikan pada dua hal, yaitu eksistensi PROPER, mendorong upaya sukarela perusahaan untuk meninterelasi konsep-konsep lingkungan dalam kegiatan produksi.

Kriteria penilaian PROPER tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yaitu peserta PROPER bersifat selektif, yaitu untuk industri yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi. PROPER memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan pencitraan atau reputasi. Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Peringkat kinerja PROPER oleh Kementrian Lingkungan Hidup di bedakan menjadi 5 warna mulai dari yang tertinggi adalah Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam sebagai peringkat terendah.

Tabel 2.1 Keterangan Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Keterangan
	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang
	dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reduce, Recycle,
Emas	dan Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang
	ber <mark>kesinam</mark> bungan, serta melakukan upaya-up <mark>aya y</mark> ang berguna
4	bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang
	Telah melakukan pengel <mark>olaan lingkungan leb</mark> ih <mark>dari</mark> yang
Hijau	dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan,
	mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk
	melakukan upaya 3R (Reduce, Recycle, dan Recovery).
	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang
Biru	dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang
	berlaku.
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetepi baru
	se <mark>bagi</mark> an mencapai hasil yang <mark>se</mark> suai dengan persyaratan
	seb <mark>aga</mark> im <mark>an</mark> a diatur dengan peraturan pe <mark>rund</mark> ang-undangan.
Hitam	Belum melakukan upaya lingkungan berarti, secara sengaja tidak
	melak <mark>ukan up</mark> aya pengelolaan lin <mark>gkun</mark> gan sebagaimana yang
	dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup

2.3.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (firm size) adalah salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Besarnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva atau total penjualan, semakin

besar total aktiva dan penjualan maka semakin besar pula ukuran perusahaan Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam (Fitriani, 2013).

Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Di sisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal, dan seperti argumen diatas, membutuhkan mekanisme *corporate governance* yang baik Diah Kusuma Wardani (2008) dalam M dan Priantinah (2012). Sesuai teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005: 381).

Penelitian yang dilakukan oleh Sarumpaet (2005), Siagian, Siregar, dan Rahadian (2013), Haji (2014), dan Titisari dan Alviana (2012) menemukan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan begitu semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi juga nilai perusahaanya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan karena peningkatan ukuran perusahaan akan diikuti penambahan saham biasa yang menyebabkan kinerja keuangan perusahaan meningkat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hariati dan Rihaningtyas (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Indonesian Stock Index* periode 2011-2013. Tata kelola perusahaan diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan isntitusional, dan jumlah komite audit. Sedangkan kinerja lingkungan diukur menggunakan peringkat PROPER serta nilai perusahaan diukur dengan *Tobin's Q*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Titisari dan Alviana (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan (PROPER) terhadap kinerja ekonomi (ROA) tahun berjalan dan tahun sedusahnya dengan sampel sebanyak 28 perusahaan publik yang berpartisipasi dalam program PROPER tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi tahun berjalan secara signifikan, akan tetapi pengujian kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi untuk tahun sesudahnya tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.

Tjahjono (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara kinerja lingkungan (PROPER) terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*) dengan kinerja

keuangan (MVA) sebagai variabel intervening dengan sampel sebanyak 31 perusahaan yang terdaftar di *Indonesian Stock Index* tahun 2010-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja ekonomi.

Bansal dan Sharma (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji peran komite audit (independensi dan frekuensi rapat) dan komponen corporate governance (CEO duality, promoter shareholding, board composition, dan board size) terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, Tobin's Q dan kapitalisasi pasar) pada <mark>perusahaan</mark> publik non keuangan yang tercatat di NSE 500 di India tahun 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q tetapi tidak signifikan terhadap ROA dan kapitalisasi pasar, frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, Tobin's Q dan kapitalisasi pasar tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Pada komponen corporate governance, CEO duality berpengaruh positif dan signifikan terhadap semua ukuran kinerja keuangan, promoter shareholding hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, Board indepedence composition berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, Tobin's Q dan kapitalisasi pasar, board size berpengaruh positif signifikan terhadap *Tobin's Q* dan kapitalisasi pasar tetapi tidak signifikan pada ROA dan ROE.

Siagian, Siregar, dan Rahadian (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menyelidiki apakah apakah praktek *corporate governance* dan kualitas pelaporan berhubungan dengan nilai perusahaan publik di Indonesia tahun 2003 dan 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur menggunakan teknik skoring berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur mneggunakan PBV, *Tobin's Q* dan ROA. Sementara kualitas pelaporan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Mishra dan Mohanty (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji persoalan corporate governance di India serta hubungan antara corporate governance dan kinerja keuangan. Corporate governance diukur menggunakan indeks dengan sistem checklist, sementara kinerja keuangan diukur menggunakan ROA. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara corporate governance (legal complience, board efficiency, dan proactive) terhadap ROA, akan tetapi indikator legal complience pengaruhnya lemah terhadap ROA.

Saridewi dan Koesrindartoto (2014) dalam penelitiannya tentang implementasi kinerja sosial dan lingkungan terhadap kinerja finansial perusahaan yang terdaftar program PROPER dan tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012 menemukan hasil bahwa kinerja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja finansial (ROA, ROE, CR, LTD-TA) sedangkan kinerja lingkungan hanya berpengaruh pofitif signifikan terhadap ROA saja.

Fitriani (2013) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meguji pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan pada BUMN

yang terdaftar di BEI tahun 2004-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun biaya lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prastina (2012) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan sampel 31 perusahaan yang terdaftar dalam ajang *Corporate Governance Perseption Index* (CGPI) *Awwards* pada tahun 2006, 2007, 2008 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil peelitian menemukan *corporate governance* yang diukur menggunakan skor CGPI berpengaruh positif terhadap ROE, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap ROA dan *Tobin's Q*.

Rakhiemah dan Agustia (2009) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh kinerja lingkungan yang diukur dengan kinerja PROPER perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)* dan kinerja finansial (return tahunan) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2006 dan berpartisipasi dalam program PROPER sejak tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif yang signifikan terhadap *CSR disclosure*, kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial, dan *CSR disclosure* tidak meimiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial.

Respati dan Yusniar (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menyusun indeks tata kelola perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui

apakah indeks GCG berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa dari 11 bagian implementasi perbankan di Indonesia peneliti menghasilkan 60 item mengenai pelaksanaan GCG pada perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan sampel sebanyak 30 perusahaan perbankan yang Go Publik di Bursa Efek indonesia diketahui bahwa rata-rata implementasi GCG pada Perbankan di Indonesia sebesar 89 yang berarti hampir semua perbankan yang telah *Go Public* telah melaksanakan GCG di perusahaan mereka masingmasing. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan dan disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pelaksanaan GCG diperbankan dengan kinerja perbankan. Namun arah yang positif mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik akan mengarah pada kinerja yang lebih baik

Yanti (2015) dalam penelitiannya yang menganalisis tentang pengaruh mekanisme good corporate governance yang terdiri dari komisaris independen, dewan direksi, kepemilikian manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan Corporate Environmental Disclosure (CSRD) terhadap nilai perusahaan BUMN periode 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara mekanisme good corporate governance dan corporate environmental disclosure terhadap nilai perusahaan. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dicerminkan dalam harga saham, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan serta *corporate environmental disclosure* juga tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Mollah, Farooque, dan Karim (2012) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur kepemilikan, karakteristik dewan dan kinerja keu<mark>ang</mark>an <mark>untuk</mark> menentukan peran tata kel<mark>ola peru</mark>sahaan dalam perilaku kinerja emiten di pasar saham Botswana, Afrika periode 2000-2007. Kinerja perusahaan diukur dengan proksi ROA, ROE, Ln Kapitalisasi Pasar dan Tobin's Q, sementara variabel struktur kepemilikan menggunakan kepemilikan direksi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan kepemilikan asing. Sementara GCG diproksikan dengan ukuran dewan, ketua ko<mark>mite audit, dan ko</mark>mit<mark>e eksekutif. Dengan variabel kontrol jenis industri, ukuran</mark> dan jenis perusa<mark>haan. Teknis a</mark>na<mark>lis</mark>is dat<mark>a mengguna</mark>ka<mark>n an</mark>alisis regresi berganda dan hasil peneliti<mark>an y</mark>an<mark>g dila</mark>kukan sangat ber<mark>agam. Hasil</mark> penelitian memberikan bukti empiris bahwa ROA, ROE dan Tobin's Q tidak cocok. Hal tersebut menyiratkan bahwa perusahaan di Bostwana telah maju ke sistem yang berorientasi pada pasar dalam mengembangkan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat dan mengurangi konflik yang ada. Sedangkan pada ukuran kinerja menggunakan market capitalization pengaruh kepemilikan sponsor, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan tidak berhasil dibuktikan. Berbeda halnya dengan kepemilikan publik yang konsisten dengan teori keagenan, kepemilikan publik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu ketua komite audit dan komite eksekutif memiliki pengaruh dikedua arah positif dan negatif dengan kinerja perusahaan.

Haji (2014) dalam penelitiannya yang menyelidiki hubungan antara atribut corporate governance dan kinerja perusahaan di Malaysia. Atribut corporate governance yang digunakan adalah anggota keluarga dalam dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Analisis data menggunakan regresi berganda dan hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara atribut corporate governance dan kinerja perusahaan, kecuali rapat dewan komisaris menunjukan pengaruh negatif dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan.

Mukti, Sudarma, dan Chandrarin (2013) dalam penelitiannya yang bertujuan menguji pengaruh mekanisme corporate governance yang diproksikan dengan transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan responsibilitas, kinerja lingkungan perusahaan dan pengungkapan lingkungan perusahaan terhadap reaksi pasar yang diproksikan dengan harga saham pada 129 perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi pasar yang diproksikan dengan harga saham. Pengujian yang dilakukan terhadap informasi kinerja lingkungan yang diproksikan dengan PROPER dan informasi pengungkapan lingkungan yang diproksikan dengan ISRA tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar yang diproksikan dengan harga saham.

M dan Priantinah (2012) dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan, pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan, Pengaruh GCG dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, GCG dan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Tabe<mark>l 2.2
Ringkasan Penelitian-penelitian Terdahulu</mark>

No	Penelitian	Variabel Variabel	Teknik Analisis	Hasil
1	Hariati dan Rihaningt yas (2015)	Dependen: Nilai Perusahaan Independen: - Kepemilikan Intitusional - Proporsi Dewan Komisaris Independen - Ukuran Komite Audit - Kinerja Lingkungan	Regresi Linier Beganda	Proporsi dewan komisaris independen dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan, kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
2	Titisari dan Alviana (2012)	Dependen: Kinerja Ekonomi Independen: Kinerja Lingkungan	Analisis Regresi Berganda	Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi tahun berjalan, kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi tahun sesudahnya.

No	Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
3	Tjahjono, (2013)	Dependen: Nilai Perusahaan Independen: Kinerja Lingkungan Intervening: Kinerja Keuangan	Path Analysis	Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja ekonomi.
4	Bansal dan Sharma (2016)	Dependen: ROA, ROE, Tobin's Q Independen: Peran Komite Audit, Komponen Corporate Governance	Regresi Data Panel	Komite audit hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q, frekuensi rapat komite hanya audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, Tobin's Q dan kapitalisasi. komponen corporate governance, CEO duality berpengaruh positif dan signifikan terhadap semua ukuran kinerja keuangan, promoter shareholding hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, Board indepedence composition berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, Tobin's Q dan kapitalisasi pasar, board size berpengaruh positif signifikan terhadap
l	JNIVER	SITAS NE	GERI SI	Tobin's Q dan kapitalisasi pasar

No	Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
5	Siagian, Siregar, dan Rahadian (2013)	Dependen: Nilai Perusahaan Independen: - Corporate Governance - Kualitas Pelaporan	Multivariate Regressions	Corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kualitas pelaporan berpengaruh negati terhadap nilai perusahaan.
6	Mishra dan Mohanty (2014)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Corporate Governance	Multiple Regression Analysis	Terdapat hubungan antara corporate governance (legal complience, board efficiency, dan proactive) terhadap ROA
7	Saridewi dan Koesrinda rtoto (2014)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: - Kinerja Sosial - Kinerja Lingkungan	Linier Regression	Kinerja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja finansial (ROA, ROE, CR, LTD-TA), kinerja lingkungan berpengaruh pofitif signifikan terhadap ROA
8	Fitriani (2013)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: -Kinerja Lingkungan - Biaya Lingkungan	Analisis Regresi Berganda	Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun biaya lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan
9	Prastina (2012)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Corporate Governance	Regresi Linier Sederhana	Corporate governance yang diukur menggunakan skor CGPI berpengaruh popsitif terhadap ROE, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap ROA dan Tobin's Q

No	Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
10	Rakhiema h dan Agustia (2009)	Dependen: Kinerja Finansial -CSR Disclosure Independen: - Kinerja Lingkungan -CSR Disclosure	Regresi	Kinerja lingkungan berpengaruh positif yang signifikan terhadap <i>CSR disclosure</i> , kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial, dan <i>CSR disclosure</i> tidak meimiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial.
11	Respati dan Yusniar (2014)	Dependen: Kinerja Perusahaan Independen: Good Corporate Governance	Analisi Regresi	Tidak terdapat pengaruh antara Pelaksanaan GCG diperbankan dengan kinerja perbankan.
		Dependen: Nilai pe <mark>rus</mark> ahaan		
12	Yanti (2015)	Independen: - Proporsi Komisaris Independen - Ukuran Dewan Direksi - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan institusional - Komite Audit - Corporate Environmental Disclosure	Analisis Regresi Berganda	Proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan corporate environmental disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
13	Mollah, Farooque, dan Karim (2012)	Dependen: Kinerja Perusahaan Independen: - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan pemerintah - Kepemilikan institusional - Kepemilikan publik - Kepemilikan publik - Kepemilikan asing - Ukuran dewan komisaris.	Regresi Berganda	Hanya kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
		Dependen: Kinerja Perusahaan		
14	Haji (2014)	Independen: - Anggota keluarga dalam dewan komisaris - Dewan Komisaris independen; Ukuran dewan komisaris; - Frekuensi rapat Dewan Komisaris Kepemilikan manajerial - Kepemilikan pemerintah.	Multiple Regression Analysis	Tidak ada hubungan yang signifikan antara atribut corporate governance dan kinerja perusahaan, kecuali rapat dewan komisaris menunjukan pengaruh negatif dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan.

No	Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
15	Mukti, Sudarma, dan Chandrari n (2013)	Dependen: Reaksi Pasar Independen: -Mekanisme Corporate Governance -Kinerja Lingkungan -Pengungkapan Lingkungan	Regresi Linier Berganda	Mekanisme corporate governance bepengaruh positif signifikan terhadap reaksi pasar, sedangkan kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar
16	M dan Priantinah (2012)	Dependen: Nilai Perusahaan Independen: -GCG -Pengungkapan CSR	Regresi Linier Berganda	GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan GCG dan pengungkapan CSR secara bersama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Sumber : Peneliti<mark>an S</mark>eb<mark>el</mark>umnya

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hariati dan Rihaningtyas (2015). Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian Hariati dan Rihaningtyas (2015) adalah adanya penambahan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, selain itu pengukuran nilai perusahaan dan good corporate governance juga berbeda. Pengukuran nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan kapitalisasi pasar, sedangkan pada penelitiannya Hariati dan Rihaningtyas (2015) menggunakan Tobin's Q. Sedangkan good corporate governance pada penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Respati dan Yusniar (2014) yang menyusun indeks tata kelola perbankan,

sedangkan pada penelitian ini peneliti mencoba menyusun indeks tata kelola perusahaan diluar sektor keuangan.

2.5 Kerangka Pikir dan Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Efektivitas *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) sangat dibutuhkan untuk mengawasi sifat oportunistik manajemen untuk memaksimumkan nilai pemegang saham. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua idividu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Karena perbedaan kepentingan tersebut, manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui informasi perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976), prinsipal (pemegang saham) yakin bahwa agen (pihak manajemen) akan membuat keputusan yang optimal hanya jika mereka diberikan insentif (bonus, penghasilan tambahan, dan opsi saham) dengan tepat, serta hanya jika mereka diawasi. Semakin baik Corporate Governance (CG) semakin tinggi pula nilai perusahaannya. dengan demikian peningkatan GCG akan mendorong peningkatan pada nilai perusahaan. Begitu pula sebaiknya, penurunan dalam GCG akan mendorong penurunan pada nilai perusahaan (M dan Priantinah, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Siagian, Siregar, dan Rahadian (2013) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, dengan demikian perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan akan meningkatkan pencapaian nilai perusahaan, begitu juga dengan M dan Priantinah (2012) yang menemukan hal sama bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusanaan.

Hal tersebut juga didukung oleh Bansal dan Sharma (2016) menemukan hubungan yang positif signifikan antara independensi Komite Audit sebagai salah satu proksi good corporate governance terhadap nilai perusahaan, frekuensi rapat komite audit terhadap ROE, Tobin's Q dan kapitalisasi pasar, komposisi board independence composition (komisaris independen) terhadap ROA, Tobin's Q dan kapitalisasi pasar. Kemudian Hariati dan Rihaningtyas (2015) menemukan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, Mishra dan Mohanty (2014) yang menemukan adanya hubungan yang positif antara corporate governance (legal complience, board efficiency, dan proactive) terhadap ROA, Prastina (2012) menemukan corporate governance perception index berpengaruh positif terhadap ROE. Mollah, Farooque, dan Karim (2012) menemukan ukurn dewan komisaris berpengaruh postif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian pembahasan diatas memberikan dugaan hubungan yang positif antara penerapan efektivitas good corporate governance terhadap nilai perusahaan.

H1 Efektifitas *Good Corporate Governance* Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan

2.4.1. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan

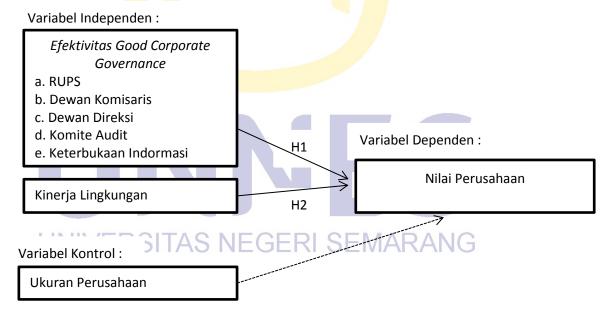
Berdasarkan *legitimacy theory*, legitimasi merupakan bentuk pengakuan keberadaan perusahaan dari masyarakat. Untuk dapat diterima masyarakat (*society*), organisasi harus dapat menyelaraskan antara tujuan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosialnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan menginginkan nilai perusahaan meningkat, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja/pengelolaan lingkungannya.

Apabila perusahaan mampu memperhatikan pengelolaan lingkungannya, maka keberadaan perusahaan tersebut akan direspon positif oleh masyarakat, sehingga citra/image nya meningkat. Disisi lain investor lebih berminat pada pe<mark>rusahaan yang memiliki ci</mark>tra/*image* baik di masyarakat, karena berdampak pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang penjualan dan profitabilitas perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula return yang diterim<mark>a sehi</mark>ngga akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan Hariati dan Rihaningtyas (2015). Selain itu, kebijakan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 berupa kemudahan untuk mendapatkan kredit bank bagi perusahaan yang taat dalam melakukan pengelolaan lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong investor untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Hariati dan Rihaningtyas (2015) bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0.035, diperkuat dengan

Titisari dan Alviana (2012) yang menemukan hal yang sama, kemudian Fitriani (2013) juga menemukan kinerja lingkungan yang berpengaru positif signifikan terhadap *Market Value Added (MVA)*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik kinerja lingkungan maka akan direspon positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, konsumen atau masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah melakukan CSR. Dengan demikian pembahasan diatas memberikan dugaan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.

H2. Kinerja Lingkungan Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan

Gambar kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Variabel efektivitas *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan
- 2. Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan..
- 3. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

5.2 Saran

Beberapa keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi hasil penelitian dan perlu menjadi bahan revisi pada penelitian selanjutnya, sehingga saran yang bisa diberikan adalah:

1. Penyusunan indeks efektivitas *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder perusahaan berupa laporan tahunan dan *website* perusahaan yang bersangkutan dan hanya menggunakan 25 indikator penilaian. Disarankan kedepannya ada kombinasi antara data sekunder dan data primer sehingga indeks GCG tersebut lebih rinci dan mampu mencerminkan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

- 2. Periode pengamatan dalam penelitian yang dilakukan pendek yaitu hanya satu tahun dan hanya menggunakan 76 perusahaan sehingga segala kejadian ekonomi dalam tahun tersebut sangat mempegaruhi hasil penelitian. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan lebih dari satu tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih mencerminkan hasil pengaruh antara good corporate governance dan/atau kinerja ingkungan terhadap nilai perusahaan.
- 3. Hasil analisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan pada tahun berjalan (periode yang sama), diharapkan pada penelitan selanjutnya unuk meneliti juga pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada tahun sesudahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S dan I.K. Ardana. 2013. "Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya". Jakarta: Salemba Empat.
- Amirya, M dan Atmini, S. 2008. Determinan Tingkat Hutang Serta Hubungan Tingkat Hutang terhadap Nilai Perusahaan: Perspektif Pecking Order Theory. *Jumal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 5 No.2.
- Bansal, N dan A.K Sharma. 2016. "Audit Committee, Corporate Governance and Firm Performance: Empirical Evidence from India". *International Journal of Economics and Finance*, Volume 8 No.3. Hal.103-116: Canadian Center of Science and Education.
- Bapepam-LK. 2006. Peraturan Bapepam X.K.6 (Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012) tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- ------ 2012. Peraturan Bapepam IX.1.5 (Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Chandra, Alvin. 2011. "Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Relevansi Nilai Laba Bersih dan Arus Kas dari Kegiatan Operasi". *Tesis*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Indonesia.
- Deborah, Margarenda. 2012. "Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan transaksi hubungan Istimewa terhadap Cash Flow". *Skripsi*. Universitas Indonesia
- Deegan dan Unerman. (2006). Financial Accounting Theory. New York: Mc Graw-Hill Education.

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- Fama, Eugene E. 1978. "The Effect of Firm's Investment and Financing Decisions on the Welfare of its Security Holders". *The American Economic Review*, Voume 68 No 2, Hal 272-284.

- Ferdinand, Aguusty. 2014. "Metode Peneltian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fitriani, Anis. 2013. "Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 1 No 1. Hal 137-148.
- Ghozali, Imam dan A. Chariri. 2007. "Teori Akuntansi: International Financial Reporting System (Ed: 4)". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21: Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosudarmo, Indrio. 2002. "Manajemen Keuangan (Ed:4). Yogyakara: BPFE Yogyakarta.
- Gunawan, Barbara. 2011. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kenijakan Deviden dan Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Investasi*. Volume 7 No.1. Hal 31-45
- Hadi, Nur. (2011). "Corporate Social Responsibility edisi Pertama". Yogyakarta :
 Graha. Ilmu.
- Haji, Abdifatah Ahmed. 2014. "The relationship between corporate governance attributes and firm performance before and after the revised code". *International Journal of Commerce and Management*, Volume 24 No 2. Hal 134-151.
- Hariati, I dan Y.W. Rihaningtyas. 2015. "Pengaruh Tata kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Medan.
- Hermuningsih, Sri. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Sruktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Jensen, Michael C dan W.H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Volume 3 No 4. Hal 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.

- M, Reny Dyah Retno dan D. Priantinah. 2012. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010), *Jurnal Nominal*, Volume 1 No 1. Hal 84-103.
- Mishra, Supriti dan P. Mohanty. 2014. "Corporate Governance as a Value Driver for Firm Performance: Evidence from India". Corporate Governance, Volume 14 No 2. Hal 265-280.
- Mollah, Sabur., O.A. Farooque, dan W. Karim. 2012. "Ownership structure, corporate governance and firm performance Evidence from an African emerging market". *Studies in Economics and Finance*, Volume 29 No 4. Hal 301-309: Emerald Group Publishing Limited.
- Mukti, Bayu T.P., M. Sudarma, dan G. Chandarin. 2013. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Lingkungan, dan Pengungkapan Lingkungan Perusahaan terhadap Reaksi Pasar". e-journal UIN Malang, Volume 4 No 1.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2014. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Prasttina, Dian. 2012. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan". *Accounting Analysis Journal*, Volume 1 No 2. Hal 1-7.
- Rahmayanti, AAW dan Solikhah, B. 2016. Peran Pengungkapan Modal Intelektual dalam Hubungan Antara Mekanisme Corporate Governance dan Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*.
- Rakhiemah, A.N dan D. Agustina. 2009. "Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibillity (CSR) Diclosure dsn Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Respati, N.W dan M.W. Yusniar. 2014. "Penyusunan Indeks Tata Kelola Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perbankan Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram, Lombok.

- Saridewi, P.N dan D.P. Koesridartoto. 2014. "The Link between Social, Environmental to Financial Performances of Companies in Indonesia". Makalah disajikan dalam *International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management*. Pattaya, Thailand. Hal 16-20.
- Sarumpaet, Susi. 2005. "The relationship between Environmental Performance and Financial Performance of Indonesian Companies". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7 No 2. Hal 89-98.
- Siagian, Ferdinand., S.V Siregar, dan Y. Rahadia. 2013. "Corporate Governance, Reporting Quality, and Firm Value: evidence from Indonesia". *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Volume 3 No 1. Hal 4-20: Emerald Group Publishing Limited.
- Solikhah, Badingatus. 2016. An Overview of Legitimacy Theory on the Inflience of Company Size and Industry Sensitivity Toward CSR Disclosure. *IJABER*. Volume 14 No 5. Hal 3013-3023.
- Sudiyatno, Bambang. 2010. Peran Kinerja Perusahaan dalam Menentukan Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko Sistematis, dan Kebijakan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Disertasi*. Undip.
- Sukamulja, Sukmawati. 2004. "Good Corporate Governance di Sektor keuangan: Dampak GCG terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)". *Benefit*. Volume 8 No. 1. Hal 1-25.
- Sukirni, Dwi. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden dan Kebijakan Hutang Analisis terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*. Volume 1 No.2.
- Surya, I dan I. Yusiavandana. 2006." Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak Istimeewa Demi Kelangsungan Usaha (Ed. 1, Vol 1)". Jakarta: Kencana.
- Titisari, K.H dan K. Alviana. 2012. "Pengaruh Enviromental Performance terhadap Economic Performance". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 No 1. Hal 56-67.
- Tjahjono, M.E.S. 2013. "Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan". *Jurnal Ekonomi*, Volume 4 No 1. Hal 34-46.
- Ulum, I. 2015. "Peran Pengungkapan Modal Intelektual dan Profitabilitas dalam Hubungan antara Kinerja Modal Intelektual dan Kapitalisasi Pasar". *Simposium Nasional Akuntansi* ke 18. Medan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Jakarta: http://www.setneg.go.id (19 Mei 2016).

Yanti, A.A. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Environmental Disclosure terhadap Nilai Perusahaan BUMN Periode 2012-2014". *Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume 4 No.1.

www.idx.co.id www.proper.menlh.go.id

